

PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MAIWA

¹⁾Maryam, ²⁾Kamaruddin Sellang, ³⁾Erfina

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Maryamdoma53@gmail.com

kamaruddinsellang@yahoo.co.id

erfina.erul85@gmail.com

Abstrak

Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena laporan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kuantitatif menggunakan model implementasi kebijakan George C Edward III. Populasi dalam penelitian ini adalah sekretaris desa dan kaur keuangan desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sampel diambil dari 42 responden menggunakan sampling jenuh. Data dianalisis dengan Skala likert. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa dari hasil uji implementasi aplikasi Siskeudes diperoleh persentase 76,325% dengan kategori "baik" dan kualitas laporan keuangan diperoleh persentase 86,08% dengan kategori sangat baik. Implementasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Berdasarkan nilai thitung \geq ttabel atau $7,850 \geq 2,021$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Implementasi Aplikasi Siskeudes (X) memiliki pengaruh sebesar 60,6% terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Setiap penambahan 1% variabel implementasi aplikasi Siskeudes akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara implementasi aplikasi Siskeudes dengan kualitas laporan keuangan, semakin naik implementasi aplikasi Siskeudes maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Siskeudes, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

Every village financial report presented must be of high quality and accountable to the public because the report can later be used by policy makers to make decisions in the administration of government. One of the things that affect the quality of financial reports is the Village Financial System (Siskeudes) used. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Siskeudes application on the quality of village financial reports in Maiwa District, Enrekang Regency. The method used in this research is descriptive with quantitative analysis using George C Edward III's policy implementation model. The population in this study is the village secretary and village finance officer in Maiwa District, Enrekang Regency. Samples were taken from 42 respondents using saturated sampling. Data were analyzed by Likert scale. Based on the research results, it can be seen that from the results of the Siskeudes application implementation test, the percentage is 76.325% in the "good" category and the quality of financial reports is 86.08% in the very good category. The implementation of the Siskeudes Application has a significant effect on the Quality of Village Financial Reports in Maiwa District, Enrekang Regency. Based on the value of tcount ttabel or 7.850 2.021 so that H_0 is rejected and H_a is accepted. Implementation of the Siskeudes Application (X) has an effect of 60.6% on the quality of financial reports (Y). Every 1% increase in the implementation variable of the Siskeudes application will improve the quality of financial reports. The coefficient is positive, meaning that there is a positive relationship between the implementation of the Siskeudes application and the quality of financial reports, the higher the implementation of the Siskeudes application, the higher the quality of financial reports.

Keywords : Policy Implementation, Siskeudes, Quality of Financial Reports

A. PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai tingkat pemerintah terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Sudah banyak peraturan yang mengatur tentang desa, seperti halnya yang ditegaskan dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 1. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga diberi keleluasaan dalam mengelola keuangan dan kekayaan miliknya.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat yang sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Demi tercapainya pembangunan desa, maka keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah. Pada tahun 2020 total dana desa seluruh Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 72 triliun. Jumlah itu naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Jika dibagi rata, setiap desa setidaknya akan

mengelola uang sebesar Rp 960 juta. Dengan diperolehnya dana alokasi APBN ini, maka akan meningkatkan penerimaan desa, sehingga diperlukan akuntansi dan manajemen dalam pelaporan keuangan yang baik di setiap desa.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi tentang arus penggunaan dana yang ada di desa. Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyelewengan. Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena laporan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi yang disajikan itu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Ketika kriteria tersebut dapat dipenuhi, itu artinya pemerintah desa telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.(Pradono and Basukianto, 2015).

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Keuangan Desa yang digunakan. Demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan pada bulan juli tahun 2015 sebagai regulator dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya. Penggunaan Siskeudes dipertegas dengan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana pada lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang mulai bulan Agustus 2016, namun hanya beberapa desa saja yang mengimplementasikannya, karena aplikasi ini masih tergolong awam dan minimnya

pelatihan dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes kepada aparatur desa. Barulah pada tahun 2017, 112 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang sudah diwajibkan memakai aplikasi Siskeudes. Khususnya Kecamatan Maiwa yang terdiri dari 21 desa, semuanya sudah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes pada tahun 2017.

Kecamatan Maiwa merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang yang memiliki desa paling banyak, dan semuanya sudah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, namun beberapa desa di Kecamatan Maiwa masih mengalami keterlambatan dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2019 disetorkan ke DPMD bidang Pemerintahan Desa selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2020, namun kenyataannya, sampai pada tanggal 12 April 2020 masih ada 9 desa dari 21 desa yang belum menyetor LPJ Keuangan Desa. Keterlambatan seperti ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di desa yang berlokasi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan judul "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan tujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Edward dalam Agustino (2012: 149) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Fahmi (2013: 2) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normatif. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, 2016 :60) antara lain Memberi Manfaat, Tepat Waktu, Lengkap, Jujur, Dapat diverifikasi, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, dalam hal ini Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan di Kecamatan Maiwa yang terlibat langsung dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes, sedangkan Teknik pengambilan sampel Nonprobability Sampling yang digunakan adalah Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100

orang Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner, dan Studi Pustaka, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabulasi frekuensi dengan menggunakan skala likert, uji kualitas data, dan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis terkait aplikasi Siskeudes dan keterlibatan BPD dan masyarakat dalam penetapan dan perubahan APBDes yang akan diinput melalui aplikasi Siskeudes. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait pengelolaan aplikasi Siskeudes, bahwa dari 42 jumlah responden, 42 orang atau 100% responden menjawab sangat baik dan tidak ada responden menjawab baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 100% yaitu pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, maka ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Keterlibatan BPD dan masyarakat dalam penetapan dan perubahan APBDes yang akan diinput melalui aplikasi Siskeudes, bahwa dari 42 jumlah responden, 18 orang atau 42,9% responden menjawab sangat baik, 14 orang atau 33,3% responden menjawab baik, 4 orang atau 9,5% responden menjawab kurang baik, 6 orang atau 14,3% responden menjawab tidak baik dan tidak ada responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 81% yaitu keterlibatan BPD dan masyarakat dalam penetapan dan perubahan APBDes yang akan diinput melalui aplikasi Siskeudes, maka ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan BPD dan masyarakat dalam penetapan dan perubahan APBDes yang akan diinput melalui aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah perangkat desa didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes,

sedangkan fasilitas yang dimaksud yaitu perangkat desa mendapatkan bantuan yang diperlukan dari pemerintah desa untuk bekerja dengan baik menggunakan aplikasi Siskeudes terkait penyediaan komputer/laptop.

Perangkat desa didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes bahwa dari 42 jumlah responden, 3 orang atau 7,1% responden menjawab sangat baik, 10 orang atau 23,8% responden menjawab baik, 20 orang atau 47,6% responden menjawab kurang baik, 8 orang atau 19,0% responden menjawab tidak baik dan 1 orang atau 2,4% responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 62,8% yaitu sumber daya manusia, maka ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Penyediaan komputer/laptop oleh pemerintah desa yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes, bahwa dari 42 jumlah responden, 40 orang atau 95,2% responden menjawab sangat baik, 2 orang atau 4,8% responden menjawab baik, dan tidak ada responden menjawab kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 99% yaitu fasilitas, maka ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa menyediakan komputer/laptop yang akan digunakan untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Disposisi dalam penelitian ini yaitu operator Siskeudes yang ditunjuk oleh pemerintah desa adalah perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi informasi komputer dan aplikasi Siskeudes, perangkat desa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes mendapatkan tambahan tunjangan selain penghasilan tetap.

Operator Siskeudes yang ditunjuk oleh pemerintah desa adalah perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang aplikasi Siskeudes dan teknologi informasi komputer, bahwa dari 42 jumlah responden, 12 orang atau 60% responden menjawab sangat baik, 19 orang atau 76% responden menjawab baik, 9 orang atau 27% responden menjawab kurang baik, 2 orang atau 4,8% responden menjawab tidak baik

dan tidak ada responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 79,6% yaitu operator Siskeudes yang ditunjuk oleh pemerintah desa memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Perangkat desa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes mendapatkan tambahan tunjangan selain penghasilan tetap, bahwa dari 42 jumlah responden, 11 orang atau 26,2% responden menjawab sangat baik, 13 orang atau 31,0% responden menjawab baik, 11 orang atau 26,2% responden menjawab kurang baik, 4 orang atau 9,5% responden menjawab tidak baik dan 3 orang atau 7,1% responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 72% yaitu pemberian tambahan tunjangan pada perangkat desa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat desa sudah bekerja sesuai SOP dalam rangka penginputan APBDes, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dan fragmentasi, yaitu perangkat desa sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka penginputan APBDes, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Perangkat desa sudah bekerja sesuai SOP dalam rangka penginputan APBDes, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, bahwa dari 42 jumlah responden, 4 orang atau 9,5% responden menjawab sangat baik, 9 orang atau 21,4% responden menjawab baik, 18 orang atau 42,9% responden menjawab kurang baik, 6 orang atau 14,3% responden menjawab tidak baik dan 5 orang atau 11,9% responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase 60,4% yaitu perangkat desa sudah bekerja sesuai SOP dalam rangka penginputan APBDes, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Kurang Baik".

Perangkat desa sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka penginputan APBDes,

penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, bahwa dari 42 jumlah responden, 1 orang atau 2,4% responden menjawab sangat baik, 4 orang atau 9,5% responden menjawab baik, 27 orang atau 64,3% responden menjawab kurang baik, 5 orang atau 11,9% responden menjawab tidak baik dan 5 orang atau 11,9% responden menjawab sangat tidak baik. dengan melihat rata-rata persentase 55,8% pada indikator perangkat desa sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka penginputan APBDes, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Kurang Baik".

Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normatif. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis, 2016 :60) antara lain Memberi Manfaat, Tepat Waktu, Lengkap, Jujur, Dapat diverifikasi, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengoreksi aktivitas keuangan periode sebelumnya, bahwa dari 42 jumlah responden, 41 orang atau 97,6% responden menjawab sangat baik, 1 orang atau 2,4% responden menjawab baik dan tidak ada responden menjawab kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase manfaat yaitu 97,6%, maka ditarik kesimpulan bahwa manfaat laporan keuangan untuk mengoreksi aktivitas keuangan periode sebelumnya pada pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Laporan keuangan desa disajikan secara tepat waktu sesuai periode pelaporan sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, bahwa dari 42 jumlah responden, 5 orang atau 11,9% responden menjawab sangat baik, 8 orang atau 19,0% responden menjawab baik, 13 orang atau 31,0% responden menjawab kurang baik, 11 orang atau 26,2% responden menjawab tidak baik dan 5 orang atau 11,9% responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase

ketepatan waktu yaitu 58,6% maka ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan desa sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dikategorikan "Kurang Baik".

Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, bahwa dari 42 jumlah responden, 26 orang atau 61,9% responden menjawab sangat baik, 11 orang atau 26,2% responden menjawab baik, 4 orang atau 9,5% responden menjawab kurang baik, 1 orang atau 2,4% responden menjawab tidak baik dan tidak ada responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase kelengkapan informasi yaitu 89,6%, maka ditarik kesimpulan bahwa kelengkapan informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, bahwa dari 42 jumlah responden, 2 orang atau 4,8% responden menjawab sangat baik, 24 orang atau 57,1% responden menjawab baik, 10 orang atau 23,8% responden menjawab kurang baik, 5 orang atau 11,9% responden menjawab tidak baik dan 1 orang atau 2,4% responden menjawab sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase informasi yang jujur yaitu 79,6%, maka ditarik kesimpulan bahwa informasi laporan keuangan menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat diuji kebenarannya dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, bahwa dari 42 jumlah responden, 27 orang atau 64,3% responden menjawab sangat baik, 12 orang atau 28,6% responden menjawab baik, 3 orang atau 7,1% responden menjawab kurang baik, tidak ada responden menjawab tidak baik dan sangat tidak baik,

dengan melihat rata-rata persentase laporan keuangandapat diverifikasi yaitu 72% maka ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dapat diverifikasi pada pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Baik".

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya, bahwa dari 42 jumlah responden, 42 orang atau 100% responden menjawab sangat baik, tidak ada responden menjawab baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase tentang laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu 100% maka ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya pada pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan, bahwa dari 42 jumlah responden, 33 orang atau 78,6% responden menjawab sangat baik, 4 orang atau 9,5% responden menjawab baik, 5 orang atau 11,9% responden menjawab kurang baik, tidak ada responden menjawab tidak baik dan sangat tidak baik, dengan melihat rata-rata persentase laporan keuangan yang dapat dipahami yaitu 93,4% maka ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dapat dipahami karena akurat dan jelas pada pemerintah desa di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Deskriptif hasil penelitian yang telah menggambarkan Bagaimana Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dilihat dari 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980:9) dalam Agustino (2012:149) maka interpretasi dan pembahasan hasil penelitian tersebut diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi. Edward III dalam Agustino (2012:149) menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus

disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Dalam implementasi kebijakan Aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, komunikasi telah aktif dilaksanakan. Pelaksana kebijakan atau staf mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dengan jelas, karena pimpinan sebagai penanggung jawab kebijakan dapat mengkomunikasikan hal-hal yang akan dilaksanakan dengan perintah yang jelas. Salah satu wujud komunikasi yang telah dilaksanakan dengan baik, pegawai sebagai pelaksana kebijakan dapat memahami makna, dan tujuan dari penerapan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari item kuisisioner dalam penelitian diperoleh data responden bahwa komunikasi dengan indikator pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dengan persentase 100% dalam kategori sangat baik, indikator keterlibatan BPD dan masyarakat dengan persentase 81% dalam kategori sangat baik.

2. Sumber Daya. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting didalam keberhasilan implementasi aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi, maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Harus ada keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. mengimplementasikan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, memiliki berbagai dinamika dalam hal sumber daya yang dimiliki. Penempatan SDM masih belum sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Karena terdapat pegawai yang ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai dengan keahlian, dan latar belakang bidang ilmu yang dimiliki. Meskipun demikian pegawai pelaksana kebijakan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis. Jika dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, seperti komputer yang digunakan dalam

pengimputan data Siskeudes sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari item kuisisioner dalam penelitian diperoleh data responden bahwa sumber daya dengan indikator sumber daya manusia 62,8% dalam kategori baik, indikator fasilitas dengan persentase 99% dalam kategori sangat baik.

3. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, perangkat desa selaku pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang aplikasi Siskeudes dalam kategori baik dengan persentase 79,6%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, penginputan dalam aplikasi Siskeudes terkadang masih terhambat karena masih ada perangkat desa yang belum mengetahui dengan baik dalam pengoperasiannya, apalagi ketika terjadi pergantian pelaksana atau ada rekrutmen baru sehingga harus memulai dari awal lagi. Kualitas implementor sangatlah berdampak pada pelaksanaan Siskeudes di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Karena sampai saat ini indikator disposisi ini masih kurang efektif, karena kepala desa kurang aktif dalam meningkatkan semangat dan motivasi pelaksana, mungkin dengan membuat terobosan berupa insentif bagi pengelola Siskeudes di Kecamatan Maiwa, secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang baik kepada tingkat motivasi pengelola Siskeudes sebagai pelaksana. Insentif yang diberikan kepala desa yang menarik dapat menumbuhkan etos kerja pelaksana aplikasi Siskeudes, apabila para pelaksana sudah memiliki etos kerja otomatis mereka akan giat belajar. Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator insentif yang berada pada angka 72%.
4. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya dengan implementasi aplikasi Siskeudes harus sesuai dengan prosedur, dengan

sistem kerja yang baik, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur dalam implementasi kebijakan aplikasi Siskeudes di Kecamatan Maiwa masih kurang baik. Didalam melaksanakan tugasnya, tidak semua implementor mengacu pada SOP yang ada, mulai dari proses penganggaran sampai pada penatausahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dengan indikator SOP yang hanya berada pada persentase 60,4% dengan kategori kurang baik. Struktur birokrasi pada indikator penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih berada pada kategori kurang baik dengan persentase 55,8%. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah dijelaskan tugas dari masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses penginputan dalam aplikasi Siskeudes, karena ketika salah satu dari pelaksana pengelola keuangan tidak melaksanakan tupoksinya maka penginputan dalam aplikasi Siskeudes akan terhambat. Selama ini peran pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Maiwa bertumpu pada satu aktor saja, yaitu Sekretaris atau Kaur Keuangan. Dengan melihat persentase dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa indikator SOP dan fragmentasi memiliki persentase rendah dibandingkan indikator lainnya yang merupakan penghambat implementasi aplikasi.

Berdasarkan data rekapitulasi kuisioner penelitian Implementasi Aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang diperoleh rata-rata 76,325% dengan kategori baik, hanya saja belum mencapai 100% karena masih ada 23,7% yang belum tercapai.

Berdasarkan keputusan yang telah dipaparkan dalam pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($7,850 \geq 2,021$) artinya signifikan. Jadi, Implementasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan pengaruh sebesar 60,6% seperti yang

ditunjukkan pada tabel model summary dimana nilai R_{square} 0,606.

Angka koefisien regresi dengannilai 0,553, menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% variabel implementasi aplikasi Siskeudes akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,553. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara implementasi aplikasi Siskeudes dengan kualitas laporan keuangan, semakin naik implementasi aplikasi Siskeudes maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan.

Sistem Keuangan Desa dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga BPKP sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan aplikasi Siskeudes yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang diperoleh rata-rata 76,325% dengan kategori "baik", Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner indikator implementasi yang seharusnya mencapai 100% karena masih ada 23,7% yang belum tercapai.
2. Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan rata-rata persentase 86,08%.
3. Implementasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t, dimana $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $7,850 \geq 2,021$ artinya signifikan, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Implementasi Aplikasi Siskeudes (X) memiliki pengaruh sebesar 60,6% terhadap kualitas laporan keuangan (Y), seperti yang ditunjukkan pada tabel model summary dimana nilai R_{square} 0,606 atau 60,6%. Setiap penambahan 1% variabel implementasi aplikasi Siskeudes akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara implementasi aplikasi Siskeudes dengan kualitas laporan keuangan, semakin naik implementasi aplikasi Siskeudes maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan.

Kabupaten Barito Timur', *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), pp. 893–903.

Gayatri and Latrini, M. Y. (2018) 'Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), p. 113.

E. REFERENSI

Buku:

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. *Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Zainuddin. 2017. *Teori-Teori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administasi Publik*. Makassar: Phinatama Media.

Jurnal:

Arifin Tahir. 2013. *Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Hlm: 36

Dartiani, N. I. P., Ayu, I. and Sri, P. (2017) '(Studi Penelitian Di Desa Sangkan Gunung , Kecamatan Sidemen ', 14(2), pp. 89–98.

Darwanis, Muhammad Arfan dan Iqlima A. Manaf. 2016. *The Effect of Understanding of Government Accounting Standard and Internal Control System on Quality of Finacial Statement from Local Government through Review Process of Financial Statement by Inspectorate Agency (A Study at Inspectorate Agencies in the Regencies and Cities of the Province of Aceh, Indonesia*. *Journal*. Vol.7, No.4, 2016.

Endang and Hayati, R. (2020) 'Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui

Masihad, A. (2018) 'Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017'.

Novirania, A. (2018) *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Geong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Skripsi*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Pradono, F. C. and Basukianto (2015) 'Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(2), pp. 188–200.

Puspasari, O. R. and Purnama, D. (2018) 'Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan', *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), p. 145. doi: 10.33603/jka.v2i2.1719.

Sulistiyowati, E. (2020) *Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa*.

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.2010*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Tentang Desa. 2014.
Jakarta:Kementrian Sekretariat Negara
Republik Indonesia.